

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Damai
dalam
Keragaman**

**Bersatu
Membangun
Negeri**

**FEBRUARI
2023**

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel, sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini tentunya masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya pemahaman sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia, sehingga masih perlu adanya koreksi untuk perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 disampaikan, sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Drs. HERMANUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700313 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	4
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	22
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	23
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	23
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	29
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN TUGAS PEMBANTUAN) PADA TAHUN 2022.....	35
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN SPM).....	36
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana beberapa kali dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan program dan kegiatan setiap tahunnya sekaligus menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi azas efektif dan efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Gubernur Tahun 2022.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyusunan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

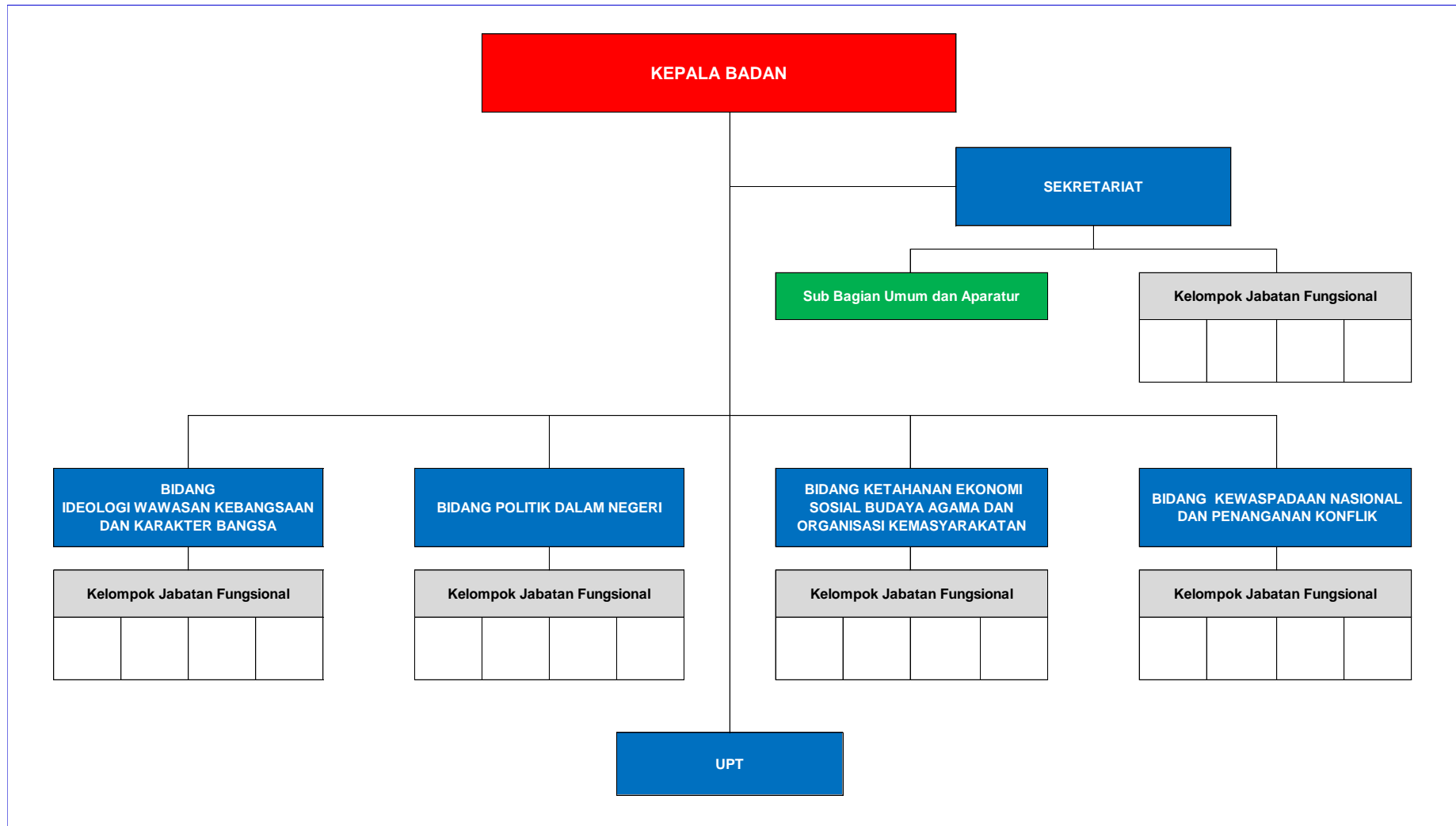
Menindaklanjuti peraturan Perundangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Politik Dalam Negeri
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan
- e. Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Permasalahan Strategis

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023. Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan yaitu :

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;
- 2) Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat;
- 3) Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- 4) Belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman;
- 5) Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama.

b. Bidang Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
- 2) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
- 4) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi.

- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :
- 1) Kurangnya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
 - 2) Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
 - 4) Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
 - 5) Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :
- 1) Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - 2) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - 3) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - 4) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 5) Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - 6) Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
 - 7) Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
 - 8) Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Provinsi Kalimantan Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, terkait dengan hal ini merupakan salah satu bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya dalam mendukung pencapaian Visi Gubernur Kalimantan Barat, yaitu:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
- c. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
- d. Mewujudkan masyarakat sejahtera
- e. Mewujudkan masyarakat yang tertib
- f. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan misi yang kelima (5) yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang tertib”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 1
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Persentase Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Meningkatnya persentase Penguatan terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100	100	100
	Meningkatnya persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase pemahaman Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			97,75	97,95	98,25
	Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			97,75	97,95	98,25

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada tahun					
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pemahaman Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			97,75	97,95	98,25	
	Meningkatnya Persentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Persentase pemahaman Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			97,75	97,95	98,25	

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	persen		$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Persen		$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
		Meningkatnya Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persen		$\frac{\text{jumlah capaian pembinaan ormas tahun } n}{\text{jumlah target pembinaan ormas tahun } n} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen		$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	
		Meningkatnya Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persen		$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Tahun 2021-2023

4. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,95
2.	Meningkatkannya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai RB	CC
		2. Nilai SAKIP	CC

Tabel 4
Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		97.95 %	7.280.009.158,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97.95 %	140.679.100,00
	Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	2	57.875.500,00
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1	19.106.400,00
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	1	18.678.400,00
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	1	18.031.200,00
	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	3	26.987.600,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.559.949.440,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	39	5.268.336.340,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Gaji dan Tunjangan ASN		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	291.613.100,00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.500.000,00
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	3.500.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			74.816.400,00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	65.715.200,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	9.101.200,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	0,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			480.423.630,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11.563.640,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	67.998.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	46.063.700,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	145.287.140,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	65.488.800,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	11.521.750,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1240	18.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	114.500.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			311.388.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	261.388.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tak Berwujud	1	50.000.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			535.516.708,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	974.888,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	93.179.300,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	441.362.520,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.735.880,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	4	101.636.537,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		dan Dibayarkan Pajaknya		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	72.099.343,00
B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			542.503.400,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	100	542.503.400,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	460	372.698.600,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	265	169.804.800,00
C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		97,95	7.075.933.787,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	97,95	7.075.933.787,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	407 Orang dan 12 partai	7.075.933.787,00
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		97,95	203.643.400,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	97,95	203.643.400,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180	203.643.400,00
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		97,95	20.139.286.690,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tersedia	97,95	20.139.286.690,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180	20.139.286.690,00
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN		97,95	1.482.253.970,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial tersedia	97,95	1.482.253.970,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360	394.085.500,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	1.088.168.470,00
	TOTAL			36.723.630.405,00

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tidak termasuk Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimal, namun dalam penyelenggaraannya memiliki standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya yang diserahkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat selama Tahun 2022 sebagai berikut yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dengan hasil pelaksanaan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan antara lain:

- a. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan dengan tema “Penguatan Falsafah Pancasila sebagai Ideologi Negara pada Generasi Muda di Era Globalisasi Digital” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 April 2022 dengan peserta sebanyak 80 orang pelajar dari 16 perwakilan SMA/SMK/MA;
- b. Dialog Kebangsaan Pembumian Pancasila dengan tema “Membumikan Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Redupnya Paham Kebangsaan pada Generasi Muda” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 Mei 2022 dengan dengan peserta sebanyak 50 orang mahasiswa dari 25 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perguruan Tinggi;
- c. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema “Merajut Kebhinekaan Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI guna Mewujudkan Masyarakat Kalbar yang harmonis” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 20 Juli 2022 dengan peserta sebanyak 80 orang dari 24 Organisasi Kemasyarakatan Lintas Etnis Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Rapat Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dilaksanakan dengan tema “Melalui Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Kita Tingkatkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 20 April 2022 dengan peserta Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar dengan fokus pembahasan pelaksanaan tugas Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- e. Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat dengan tema “Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 21 April 2022 dengan peserta lintas sektor : Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, Masyarakat sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Kemendagri Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalbar dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental;
- f. Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat ke-I yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 27 April 2022 dengan peserta lintas sektor : Perangkat Daerah Provinsi, TNI, Polri, Partai Politik, Akademisi, dan Masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- g. FGD Penyusunan Rencana Aksi Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 5 s.d.13 Juli 2022 dengan peserta lintas sektor: Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat;
- h. Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat ke-II yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 9 November 2022 dengan peserta lintas sektor : Perangkat

- Daerah Provinsi, TNI, Polri, Partai Politik, Akademisi, dan Masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- i. FGD Penyusunan Laporan Aksi Nyata Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 22 s.d.30 November 2022 dengan peserta lintas sektor : Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Akademisi, Media, dan Masyarakat;
 - j. Rapat Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema “Sinkronisasi Penyusunan Program dan Kegiatan FPK dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 2 Desember 2022 dengan peserta lintas sektor : Badan Kesbangpol kab/Kota se Kalbar dan Organisasi Kemasyarakatan Lintas Etnis Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan hasil pelaksanaan melalui:
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan antara lain:
 - 1) Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 dengan mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan oleh BPIP RI dari Lapangan Pancasila Ende Provinsi NTT melalui virtual di *Data Analytic Room* Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
 - 2) Peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember 2022 dengan pelaksanaan upacara Peringatan Hari Bela Negara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan Inspektur Upacara Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan peserta upacara berasal dari PNS Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Lomba TikTok Nasionalisme dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara yang diikuti oleh Generasi Muda Kalimantan Barat yang berusia 16-30 Tahun.
 - b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial antara lain:
 - 1) Lomba Video Pendek Damai Negeriku yang diikuti oleh Pelajar SMA/SMK/MA se Kalimantan Barat.
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional dengan hasil pelaksanaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi antara lain:
 - a. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat dengan tema “Bersama Kita Tingkatkan Moderasi Beragama menuju Terciptanya Toleransi dan Kerukunan di Daerah” yang dilaksanakan di Kabupaten Landak pada tanggal 8 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Anggota FKUB;

- b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang tanggal 29 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Anggota FKUB.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil pelaksanaan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulaitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial antara lain:
 - a. Pembinaan Kewaspadaan Dini di Daerah dirangkaikan dengan Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2024 yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 45 orang berasal dari TNI, Polri, Pemuda, kelompok masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Ormas;
 - b. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota Se Kalimantan Barat Ke-I yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 24 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 75 orang berasal dari Tim Terpadu dan Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah dengan tema “Kewaspadaan Dini melalui Kolaborasi yang Terintegrasi” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 April 2022 dengan peserta sebanyak 45 orang berasal dari Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalbar;
 - d. FGD Forkopimda Masyarakat dan Mahasiswa yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 dengan menghadirkan Peserta dari unsur masyarakat dan Mahasiswa;
 - e. FGD Forum Kewaspadaan Dini MAsyarakat dengan tema “Sinkronisasi Program FKDM dalam Temu Cepat dan Lapor Cepat terhadap Potensi Permasalahan di Daerah” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 dengan menghadirkan Peserta dari unsur masyarakat dan Mahasiswa;
 - f. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota Se Kalimantan Barat Ke-I dengan tema “Cegah Dini, Tangkal Radikalisme, Terorisme dan Separatisme melalui Kolaborasi terintegrasi” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 1 November 2022 dengan peserta sebanyak 75 orang berasal dari Tim Terpadu dan Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. Rapat Koordinasi Pusat Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan tema “Sinergitas Sistem Komunikasi dan Informasi Guna Meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 Desember 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak

asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil pelaksanaan melalui:

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulaitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 7 Maret 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
 - Tingkat cakupan vaksinasi Covid-19 di Kalbar 4 Maret 2022 dan Implementasi PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 di Kalimantan Barat;
 - Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat dan Data Sebaran Titik Hotspot 4 s.d. 6 Maret 2022;
 - 2) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 29 Juni 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
 - Upaya Pencegahan dan Penanganan terhadap Organisasi Khilafatul Muslimin;
 - Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Ternak;
 - Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
 - Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 16 November 2022 dengan menghadirkan Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dengan isu aktual:
 - Persiapan Pelaksanaan BIMP-EAGA;
 - Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM;
 - Penanganan Bencana Banjir.
 - b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas antara lain:
 - 1) Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat ke-I yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 26 April 2022 dengan peserta berasal dari Unsur TNI, Polri, BIN Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat ke-II yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 3 September 2022 dengan peserta berasal dari Unsur TNI, Polri, BIN Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan hasil pelaksanaan melalui:
- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik antara lain:

- 1) Pembinaan kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat dengan tema “Meningkatkan Peran Partai Politik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 1 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Partai Politik dan Kesbangpol Kabupaten/Kota;
 - 2) *Talk Show* Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dengan tema “Peranan Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa Kota Pontianak;
 - 3) Rakor Pembahasan Komponen Bersama Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Badan Kesbangpol, KPUD, Dan Panwaslu Se Kalimantan Barat;
 - 4) Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula dengan tema “Pemilih Pemula dan Pemilu Serentak dalam Era Kemajuan Teknologi Digital” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 31 Maret 2022 dengan peserta sebanyak 70 orang berasal dari Pelajar SLTA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat;
 - 5) *Focus Group Discussion Politik* bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat dengan tema “Partisipasi Politik Perempuan dalam Menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 17 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 60 orang berasal dari Organisasi Perempuan Provinsi Kalimantan Barat;
 - 6) *Talk Show* Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dengan tema “Pemilu dan Demokrasi” yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 Juni 2022 dengan peserta sebanyak 65 orang berasal dari pelajar dan mahasiswa;
 - 7) Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik Tahun 2022 Se Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada Tanggal 27 Juni 2022 dengan Peserta sebanyak 15 orang finalis dari Pelajar SLTA Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat.
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas antara lain:
- 1) Pembinaan bagi Organisasi Kemasyarakatan dengan tema “Meningkatkan Kemandirian Ormas sebagai Mitra Pemerintah” yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 19 Mei 2022 dengan peserta sebanyak 50 orang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan hasil pelaksanaan melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas antara lain:
 Fasilitasi Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat. Per 31 Desember 2022 telah mendaftarkan ormas sebanyak 47 ormas selama Tahun 2022 dengan data

keseluruhan ormas berjumlah 648 ormas dengan status aktif 180 ormas dan tidak aktif 468 ormas.

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,95	99,60	101,68
2.	Meningkatkannya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai RB	CC (n/a)	B (24,92)	24,92
		2. Nilai SAKIP	CC (n/a)	B (64,91)	64,91

Penjelasan:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis 1 dengan target 97,95% dapat direalisasikan sebesar 102 % hal ini dilakukan dengan memberikan

pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dengan total masyarakat yang diberikan pemahaman sebanyak 1497 orang.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4.1..1.1.1. Implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi dengan melaksanakan 8 area perubahan secara keseluruhan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dimulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.1..1.1.2. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja	Nilai : 19,20
b. Pengukuran Kinerja	Nilai : 18,60
c. Pelaporan Kinerja	Nilai : 9,60
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<u>Nilai : 17,50</u>
Nilai Hasil Evaluasi	Nilai : 64,91
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	542.503.400	539.913.432	99,52	100 %	0,48
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.075.933.787	7.069.106.687	99,90	102 %	0,10
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	203.643.400	198.972.732	97,71	100 %	2,29
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.139.286.690	20.138.920.940	99,998	103 %	0,002
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.482.253.970	1.413.644.600	95,37	98 %	4,63

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatkanya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.280.009.158	7.120.856.680	97,81	100 %	2,19

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 430 orang, melalui:
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 407 orang;
 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 180 orang;
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 120 orang;
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berhasil mencapai target kinerja dengan pemberian pemahaman kepada 360 orang.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 7
Realisasi Kinerja Tahun ini dan Capaian Kinerja Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Capaian Indikator Kinerja		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	92,52	99,35	99,60	n/a	102	102
2.	Meningkatkannya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai RB	B	B	B	B	B	B
		2. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2023
			2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	92,52	99,35	99,60	98,25
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai RB	B	B	B	B
		2. Nilai SAKIP	B	B	B	B

Penjelasan:

Dari tabel 15 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja tahun 2020-2022 dengan indikator kinerja utama Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik Mengalami Kenaikan dari Tahun ke Tahun yaitu 92,52 %, 99,35 %, 99,34 %, sedangkan untuk indikator kinerja utama Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah juga mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022 dengan target awal CC menjadi perdikat B.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 Pada tahun 2022, capaian kinerja dinyatakan berhasil karena target kinerja 2022 dapat dicapai secara keseluruhan. Adapun penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
 - b. Target sasaran peserta kegiatan dapat dicapai;
 - c. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN TUGAS PEMBANTUAN) PADA TAHUN 2022

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2022 tidak mendapat wewenang dari pemerintah pusat terkait dengan capaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pembantuan (Nihil).

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN SPM)

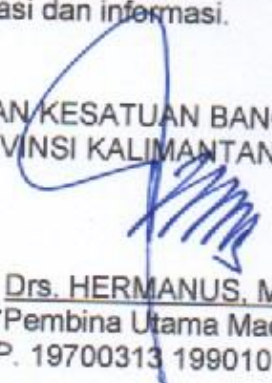
Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2022 tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB IV PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya "good governance", yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya tidak sesuai target. Diharapkan nantinya LPPD tahun 2022 ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan LPPD yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disampaikan, untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan informasi.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


Drs. HERMANUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700313 199010 1 001